



BAMBANG SATRIYA, ANDI SUWIRTA & AYI BUDI SANTOSA

Ulama Pejuang dari Serambi Mekkah: Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Peranannya dalam Revolusi Indonesia di Aceh, 1945-1950

ABSTRAKSI: Penelitian ini – dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode sejarah, dan studi pustaka – mengkaji sosok Teungku Muhammad Daud Beureueh, sebagai ulama pejuang, yang memiliki pengaruh besar pada masa revolusi Indonesia di Aceh, 1945-1950. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi politik dan sosial-ekonomi di Aceh pasca kemerdekaan Indonesia tidak stabil. Kemudian, Teungku Muhammad Daud Beureueh berperan penting dalam peristiwa Cumbok, dengan memberikan penyadaran terhadap Pemerintah Daerah agar memperhatikan konflik horizontal yang sedang terjadi dan menginstruksikan untuk memobilisasi pasukan guna menyerang kaum Uleebalang (bangsawan) di Pidie, Aceh. Ia pun mampu menghentikan gerakan TPR (Tentara Perjuangan Rakyat) pimpinan Husin al-Mujahid. Ketika menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureueh mampu meleburkan berbagai laskar perjuangan ke dalam tubuh TNI (Tentara Nasional Indonesia); dan menjadi salah satu inisiator pengumpulan dana untuk pembelian pesawat terbang Indonesia. Sikap yang diambil oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah menolak ketika Aceh hendak digabungkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara, sehingga hal ini membuatnya kecewa kepada Pemerintah Pusat di Jakarta, khususnya kepada Presiden Soekarno.

KATA KUNCI: Teungku Muhammad Daud Beureueh; Ulama Aceh; Peranan; Revolusi Indonesia.

ABSTRACT: “Warrior Cleric from the Porch of Mecca: Teungku Muhammad Daud Beureueh and His Role in the Indonesian Revolution in Aceh, 1945-1950”. This research – using qualitative approaches, historical methods, and literature studies – examines the figure of Teungku Muhammad Daud Beureueh, as a warrior cleric, who had a great influence during the Indonesian revolutionary period in Aceh, 1945-1950. The results showed that the political and socio-economic conditions in Aceh after Indonesia’s independence were unstable. Then, Teungku Muhammad Daud Beureueh played an important role in the Cumbok incident, by giving awareness to the Regional Government to pay attention to the horizontal conflict that was happening and instructed to mobilize troops to attack the “Uleebalang” (Aristocrats) in Pidie, Aceh. He was also able to stop the TPR (People’s Struggle Army) movement led by Husin al-Mujahid. While serving as the Military Governor of Aceh, Langkat, and Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureueh was able to fuse various paramilitary troops into the Indonesian Armed Forces; and became one of the initiators of the collection of funds for the purchase of Indonesian airplanes. The attitude taken by Teungku Muhammad Daud Beureueh was to refuse when Aceh was about to be integrated into the Province of North Sumatra, so this made him disappointed in the Central Government in Jakarta, especially to President Soekarno.

KEY WORD: Teungku Muhammad Daud Beureueh; Acehnese Ulama; Role; Indonesian Revolution.

About the Authors: Bambang Satriya, S.Pd. adalah Alumni Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung. Andi Suwirta, M.Hum. dan Ayi Budi Santosa, M.Si. adalah Dosen Senior di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis bisa dihubungi melalui alamat email: cast.bambang@gmail.com dan suciandi@upi.edu

Suggested Citation: Satriya, Bambang, Andi Suwirta & Ayi Budi Santosa. (2019). “Ulama Pejuang dari Serambi Mekkah: Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Peranannya dalam Revolusi Indonesia di Aceh, 1945-1950” in *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, Volume 4(1), February, pp.35-54. Bandung, West Java, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, with ISSN 2443-1776 (print) and ISSN 2657-0491 (online).

Article Timeline: Accepted (October 28, 2018); Revised (December 27, 2018); and Published (February 28, 2019).

PENDAHULUAN

Masa revolusi di Indonesia tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan, seperti Jakarta dan Yogyakarta, melainkan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali wilayah Aceh (Reid, 1974; Drooglever, 1999; and Vickers, 2005). Wilayah yang disebutkan terakhir ini memiliki dinamika dan kekhasan tersendiri, ketika masa mempertahankan kemerdekaan berlangsung. Hal ini terbukti bahwa Aceh tidak mengalami pendudukan kembali oleh Belanda. Meskipun Belanda sudah mencoba memaksa masuk, namun mereka merasa kesulitan dan hanya mampu berada di wilayah terluar Aceh (Kahin, 1995; Ricklefs, 2007; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Mungkin Belanda telah belajar dari Perang Aceh, 1879-1908, bahwa rakyat Aceh sulit untuk ditaklukkan, sehingga mereka mengurungkan niat untuk kembali menguasai Aceh. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Belanda tidak mampu menguasai Aceh secara keseluruhan selama masa revolusi Indonesia, 1945-1950 (Zentgraaf, 1983; Veer, 1987; dan Ricklefs, 2007).

Pada masa yang terkenal akan gejolak sosial dan politik ini, banyak peristiwa yang mewarnai perjalanan sejarah Aceh. Di samping itu, banyak bermunculan pula tokoh-tokoh pada masa berkenaan. Tokoh-tokoh tersebut tidak hanya muncul, melainkan memiliki peranan yang menonjol selama masa revolusi Indonesia di Aceh. Tokoh-tokoh yang bermunculan pada masa itu, antara lain, Teuku Nyak Arif, Mr. Teuku Mohammad Hasan, Mr. S.M. Amin, Ali Hasjmy, dan tidak terkecuali Teungku Muhammad Daud Beureueh, yang menjadi salah satu tokoh dengan peranan penting selama masa

revolusi berlangsung di Aceh (Roring, 2000; Ibrahimy, 2001; Fajar, 2015; Gade & Don, 2018; dan Siregar, 2018).

Di Aceh pernah terjadi peristiwa penting, yakni perang saudara yang melibatkan masyarakat sipil melawan masyarakat sipil. Perang ini sering dinamakan sebagai “Peristiwa Cumbok”. Seperti diketahui bahwa di Aceh terdapat dua buah kekuatan besar, yakni kaum ulama yang sering disebut *Teungku*; dan kaum adat atau bangsawan dengan sebutan *Teuku*, yang biasa disebut juga sebagai kaum *Uleebalang* (Daud, 2006; Heryati, 2015; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Beberapa hal yang membuat Peristiwa Cumbok ini terjadi adalah adanya perbedaan kepentingan antara kedua kelompok besar di Aceh tersebut. Kalangan *Uleebalang* tidak seluruhnya mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka menginginkan Belanda untuk memerintah kembali di Indonesia. Hal ini juga ditengarai bahwa telah lama sebetulnya ada hubungan yang tidak harmonis antara kaum ulama dan kaum pamong praja di Aceh. Kalangan ulama menuding bahwa *Uleebalang* hanya menjadi boneka penjajah Belanda (Daud, 2006; Dewanto ed., 2011:8; dan Heryati, 2015).

Selama Peristiwa Cumbok, Teungku Muhammad Daud Beureueh memiliki peranan yang penting. Setelah Peristiwa Cumbok, posisi ulama mengalami perubahan dalam kancah perpolitikan di Aceh. Keadaan tersebut diperkuat dengan adanya gerakan TPR (Tentara Perjuangan Rakyat), yang menginginkan semua *Uleebalang* turun dari jabatan pada pemerintah lokal di Aceh. Gerakan yang dipimpin oleh Husin al-Mujahid ini menganggap jika mereka, para *Uleebalang*,

tetap pada puncak kekuasaan, siapakah yang sanggup menjamin bahwa mereka tidak akan kembali ke tabiat yang semula (Saleh, 1992:103; Wiratmadinata, 2014; dan Heryati, 2015).

Namun, pada akhirnya, gerakan ini mampu dihentikan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, selaku golongan ulama, yang memiliki posisi kuat kala itu di Aceh. Ia menganggap jika gerakan tersebut telah menyimpang dan condong kepada sikap Husin al-Mujahid, yang ambisius akan kekuasaan (Ibrahimi, 2001; Agustiningih, 2007; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Selama masa revolusi, Teungku Muhammad Daud Beureueh memiliki peranan yang cukup dominan. Hal ini terbukti dengan jabatan yang pernah ia sandang sebagai Gubernur Militer untuk daerah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Padahal, Teungku Muhammad Daud Beureueh notabene hanya seorang ulama. Suatu keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Selama menjabat sebagai Gubernur Militer, misalnya, ia mampu membentuk TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Aceh. Selain itu, hal yang mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat Aceh kepada Indonesia berupa pesawat terbang. Berkumpulnya biaya untuk pembelian pesawat terbang ini pun tidak lepas dari peranan seorang Teungku Muhammad Daud Beureueh (Al-Chaidar, 1999; Ibrahimi, 2001; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Dalam kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh, saat beliau berpidato di Lapangan Blang Padang, Kutaraja, pada tanggal 16 Juni 1948, Bung Karno (sebutan akrab

untuk Presiden Soekarno) mengatakan bahwa Aceh adalah daerah modal. Beliau mengibaratkan Aceh sebagai sebuah payung. *“Kalaupun Republik hanya tinggal selebar payung, kita akan terus berjuang, dengan modal daerah selebar payung itulah kita merebut daerah lain”* (dalam Sufi *et al.*, 1997:70).

Namun, semua hal yang telah diperjuangkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh seakan tidak dihargai oleh pemerintah Pusat, menjelang masa revolusi berakhir. Pasca pengakuan kedaulatan kepada Indonesia, sebagai hasil dari KMB (Konferensi Meja Bundar) pada bulan Desember 1949, status wilayah Aceh mengalami perubahan. Hal ini berujung kepada penolakan dari Teungku Muhammad Daud Beureueh, sehingga ia mulai tidak memercayai pemerintah Pusat. Pada akhirnya, perubahan status wilayah Aceh ini berujung kepada sikap yang diambil oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan memberikan perlawanan kepada pemerintah Pusat (Sjamsuddin, 1999; Umar & Al-Chaidar, 2006; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Melihat kontribusi Teungku Muhammad Daud Beureueh selama masa revolusi di Aceh berlangsung, membuat penulis menaruh ketertarikan kepada sosok tokoh ini. Khususnya peranan yang ia jalankan dan pengaruh yang ia miliki ketika membawa rakyat Aceh melewati masa-masa sulit, masa revolusi Indonesia (1945-1950). Namun, dewasa ini Teungku Muhammad Daud Beureueh seakan-akan hanya dikenal sebagai seseorang dengan predikat “buruk”, yang tidak lain sebagai pemimpin DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di Aceh. Padahal, beberapa masa sebelumnya, ia adalah sosok penting bagi rakyat Aceh dan

Indonesia (Al-Chaidar, 1999; Umar & Al-Chaidar, 2006; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Hal tersebut dibuktikan dengan rekam jejak yang dimilikinya. Teungku Muhammad Daud Beureueh pernah menduduki jabatan yang strategis dalam beberapa organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), sebuah organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Selain itu, pada organisasi kemiliteran, ia pernah menjabat sebagai Gubernur Militer, yang meliputi wilayah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Ia pun tak segan untuk mendorong kaum muda Aceh untuk melawan Belanda (Lapian *et al.*, 1996:14; Illham, 2016; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Posisi yang pernah diemban oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh itu berhasil ia maksimalkan, sekaligus memanfaatkannya dengan baik untuk kepentingan rakyat Aceh, juga bagi kepentingan bangsa Indonesia. Tidak salah apabila A.J. Piekaar (1949), sebagaimana dikutip juga dalam Muhammad Nur El Ibrahimy (2001), mengatakan bahwa di antara ratusan, mungkin ribuan ulama-ulama di Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah yang paling berpengaruh (Piekaar, 1949; dan Ibrahimy, 2001:267).

Penulis membatasi ruang lingkup yang dikaji, baik secara spasial maupun temporal. Pada aspek spasial, penulis mengambil ruang lingkup di seputar wilayah Aceh. Sedangkan pada aspek temporal, penulis mengambil kurun waktu dari tahun 1945 hingga tahun 1950, yang merupakan masa-masa genting bagi kelangsungan Republik Indonesia. Tahun

1945 dipilih oleh penulis, sebab pada tahun itu Indonesia lahir sebagai negara baru, setelah memproklamasikan diri pada 17 Agustus 1945. Sedangkan tahun 1950 dipilih, karena berdekatan dengan Konferensi Meja Bundar (KMB), yang berlangsung pada tahun akhir 1949 dan berujung kepada pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia, yang memberikan dampak langsung kepada wilayah Aceh dan Teungku Muhammad Daud Beureueh sendiri. Hal itu dapat dijadikan acuan mengenai sikap dari Teungku Muhammad Daud Beureueh perihal perubahan status wilayah Aceh, tidak lama setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, pada tanggal 27 Desember 1949.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau metode sejarah, dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur (Sjamsuddin, 2007; Denzin, 2008; dan Zed, 2008). Metode historis merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Pernyataan tersebut dapat memberikan indikasi bahwa seorang peneliti sejarah perlu melakukan pengujian dan analisis terhadap sumber-sumber yang sesuai dengan tema penelitian yang akan dibahas, dan kemudian direkonstruksi dalam bentuk tulisan, setelah sebelumnya diberikan analisis-analisis yang sesuai (Gottschalk, 1983:32; Sjamsuddin, 2007; dan Kuntowijoyo, 2013). Adapun tahap-tahap dalam metode historis itu meliputi empat langkah penelitian, yaitu:

Pertama, *Heuristik*. Ini merupakan langkah pertama dari metode sejarah. Langkah ini mengharuskan seorang

peneliti sejarah untuk mencari dan mengumpulkan berbagai macam sumber sejarah yang sesuai dengan kajian dan akan dibahas oleh peneliti tersebut. Sumber-sumber sejarah yang dapat dicari dan dikumpulkan bisa berupa sumber tertulis dan sumber lisan, bahkan benda berupa dokumen dan monumen, seperti gambar, foto, dan bangunan (Sjamsuddin, 2007; Kuntowijoyo, 2013; dan Alian, 2017).

Selama melakukan pencarian sumber, penulis mengunjungi beberapa tempat seperti Perpustakaan UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung; Perpustakaan UNPAD (Universitas Padjadjaran) di Bandung; BAPUSIPDA (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah) Jawa Barat di Bandung; BPNB (Badan Pelestarian Nilai Budaya) di Bandung; BAPAPSI (Badan Perpustakaan, Arsip, dan Pusat Sistem Informasi) Kabupaten Bandung; Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung; Perpustakaan Batu API di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat; Perpustakaan Pusat TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat) di Bandung; dan koleksi perpustakaan pribadi penulis sendiri.

Kedua, *Kritik*. Ini terutama berkenaan dengan kritik sumber, yang merupakan kegiatan seorang peneliti sejarah dalam melakukan klasifikasi dan penilaian suatu sumber sejarah. Hal ini dilakukan agar sumber sejarah yang telah didapatkan oleh penulis benar-benar terpercaya, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan kritik sumber terbagi ke dalam dua aspek, yaitu kritik eksternal dan kritik internal (Gottschalk, 1983; Sjamsuddin, 2007; dan Kuntowijoyo, 2013).

Penulis melakukan kritik internal dengan membandingkan, misalnya, buku-buku yang ditulis oleh Nazaruddin

Sjamsuddin (1999) dengan buku karya Muhammad Nur El Ibrahimy (2001). Dalam bukunya, Nazaruddin Sjamsuddin (1999) menjelaskan bahwa Teungku Muhamamd Daud Beureueh menjadi salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam masa revolusi Indonesia, yang berlangsung di Aceh. Hal yang senada pun tergambar dalam karya Muhammad Nur El Ibrahimy (2001), yang sama-sama menjelaskan bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh menjadi salah satu pemimpin masyarakat Aceh dengan jiwa republikan yang dimilikinya (*cf* Sjamsuddin, 1999; dan Ibrahimy, 2001).

Ketiga, *Interpretasi*. Ini merupakan suatu penafsiran yang dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil pemikiran terhadap keterangan atau fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Namun, tentu saja, dalam melakukan penafsiran harus tetap bersifat ilmiah. Ketika melakukan penafsiran, penulis menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu, seperti Sosiologi dan Ilmu Politik, untuk memperkaya konsep-konsep dan pola-pola tertentu dalam peristiwa sejarah (Kartodirdjo, 1992; Sjamsuddin, 2007; dan Kuntowijoyo, 2013).

Keempat, *Historiografi*. Ini merupakan tahap akhir dalam metode sejarah. Pada tahap ini, penulis melakukan penyusunan suatu cerita sejarah kedalam satu kesatuan yang utuh. Penulis menyusun secara sistematis, dengan mendasarkan kepada ketentuan yang berlaku. Pada tahap ini, penulis sejarah biasanya menerapkan kaidah penulisan supaya menghasilkan tulisan yang baik dan bersifat ilmiah (Sjamsuddin, 2007; Kuntowijoyo, 2013; dan Kurniawati, 2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teungku Muhammad Daud Beureueh dilahirkan di Beureunun, Aceh, pada 23 September 1899. Ia dilahirkan dengan nama Muhammad Daud. Masa kecil hingga dewasa, Teungku Muhammad Daud Beureueh begitu dekat dengan pendidikan Islam. Mula-mula ia belajar di Pesantren Titeue selama setengah tahun. Kemudian pindah ke Pesantren Iie Leumbeue selama empat setengah tahun (Al-Chaidar, 1999; Ibrahimy, 2001:262; dan Muhammaddar, 2014).

Setelah beranjak dewasa, Teungku Muhammad Daud Beureueh menasbihkan dirinya menjadi ulama reformis dengan membentuk Madrasah Sa'adah Abidiyah, yang merupakan inovasi dalam pendidikan Islam dari pesantren yang terbatas hanya mempelajari ilmu agama menjadi madrasah yang memungkinkan mempelajari ilmu-ilmu lain, selain ilmu agama yang dijadikan dasar (Al-Chaidar, 1999; Iqbal & Rizal, 2012; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Pada tanggal 5 Mei 1939, PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) terbentuk di Peusangan, Bireuen, Pantai Utara Aceh (Shiraishi, 1988:41; Al-Chaidar, 1999; dan Illham, 2016). Secara aklamasi, Teungku Muhammad Daud Beureueh terpilih sebagai Ketua PUSA, dengan Wakil Ketua PUSA Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap, sedangkan sebagai Pelindung PUSA ditetapkan Ampon Chik Peusangan (Saleh, 1992:17; Illham, 2016; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Kebanyakan yang tergabung dalam organisasi PUSA adalah ulama reformis, yang bermaksud untuk membentuk suatu wadah dalam menyatukan pikiran di antara mereka. Kehadiran PUSA

diharapkan mampu meningkatkan solidaritas antara sesama ulama di Aceh, supaya tidak terjadi perpecahan sesama ulama. Tidak lama kemudian, PUSA masuk kedalam MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia); dan, dengan demikian, para ulama Aceh yang tergabung di dalamnya mulai aktif melibatkan diri dalam pergerakan Islam dan perjuangan nasional Indonesia (Surachman & Kutoyo, eds., 1977:214; Umar & Al-Chaidar, 2006; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang (1942-1945), pihak ulama memiliki kedekatan dengan pihak Jepang. Sebab, tujuan Jepang ke Indonesia tidak seperti Belanda, yang terlebih dahulu datang. Jepang pun dianggap sebagai pihak yang telah lama dinantikan, karena belum ada yang mampu mengusir Belanda. Perbedaan lainnya terletak dari tindakan Belanda yang kerap melakukan misi penyebaran agama Kristen Protestan, sedangkan Jepang tidak melakukan hal yang demikian (Benda, 1980; Suwirta, 1989; dan Oktorino, 2017). Dalam konteks para ulama di Aceh, kedekatan itu terlihat dengan hubungan yang terjalin antara Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan pemerintah pendudukan Jepang, yang menunjuknya sebagai Wakil MAIBKATRA atau Majelis Agama Islam untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya (Al-Chaidar, 1999; Illham, 2016; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Memasuki masa kemerdekaan Indonesia, keadaan politik di Aceh berjalan dengan penuh dinamika. Aceh dijadikan salah satu keresidenan, yang bernaung dalam Provinsi Sumatera dan dipimpin oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan sebagai Gubernur pertama Sumatera. Kegiatan pemerintah di

daerah Aceh baru berjalan pada awal bulan Oktober 1945, setelah keluarnya penetapan dari Gubernur Provinsi Sumatera, pada tanggal 3 Oktober 1945, tentang pengangkatan pejabat pemerintah NRI (Negara Republik Indonesia) di seluruh Sumatera (Surachman & Kutoyo eds., 1977:180; Roring, 2000; dan Raditya, 2017).

Meskipun sudah dalam keadaan merdeka, namun keamanan dalam negeri harus semakin ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan organisasi kemiliteran yang memiliki posisi vital. Di Aceh dibentuk API (Angkatan Pemuda Indonesia), yang bertujuan sebagai pemenuhan pembentukan alat kelengkapan negara, juga untuk merebut persenjataan dari pihak tentara Jepang. Residen Aceh berpesan supaya buat sementara dipakai kata “pemuda”, yang sewaktu-waktu dapat diubah menjadi “perang”, jika saatnya telah tiba (cf Nasution, 1977:440; Anderson, 1988; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

API diprakarsai oleh beberapa pemuda bekas *Giyugun*, semacam PETA (Pasukan Pembela Tanah Air) di Jawa, yang mempunyai gagasan membentuk organisasi keamanan. Untuk merealisasikan gagasan tersebut, pada 27 Agustus 1945, mereka mengadakan pertemuan di Hotel Sentral (Nasution, 1977; Iskandar, 2000:85; dan Zed, 2005). Pembentukan organisasi kemiliteran ini dimaksudkan agar keamanan di Aceh tetap kondusif dan untuk menunjang keberlangsungan pemerintahan di tengah keadaan yang belum stabil. Secara rinci, tugas API antara lain memelihara ketenteraman umum, merebut senjata dari Jepang, membasmi musuh-musuh proklamasi yang bersifat dan bercorak apa

saja, serta memimpin gelora massa yang bergolak dengan semangat perjuangan (Wahidy, 1960:73; Nasution, 1977; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Sebelum lahir API, telah terbentuk PRI (Pemuda Republik Indonesia) di Pidie. Ketuanya ialah Teungku Hasan Aly, yang berafiliasi dengan BPI (Barisan Pemuda Indonesia) di bawah pimpinan Ali Hasjmy (Saleh, 1992:39; Reid, 2009; dan Gade & Don, 2018). PRI dan BPI kemudian berubah menjadi PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia), yang tetap dipimpin oleh Ali Hasjmy. Di samping PESINDO, terdapat laskar perjuangan lainnya, seperti *Hisbullah*, yang kemudian berubah menjadi *Mujahidin*, dan dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh (Sufi, Nasir & Zulfan, 1997; Al-Chaidar, 1999; dan Gade & Don, 2018).

Mayoritas anggota dari kedua laskar perjuangan itu berasal dari kalangan pendukung ulama, yang tergabung dalam Pemuda PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Baik PESINDO maupun *Mujahidin*, keduanya merupakan jelmaan dari semangat para pemuda Aceh yang memiliki tujuan sama, yakni untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi, mereka memiliki keengganan untuk ikut bergabung dalam API, yang kemudian menjadi pasukan resmi (Al-Chaidar, 1999; Heryati, 2015; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Antara API dan laskar perjuangan kepemudaan memiliki perbedaan latar belakang. API yang berkomposisi bekas *Giyugun*, serta memiliki pendidikan militer dan pengalaman yang cukup. Selain itu, petinggi-petinggi API pun kebanyakan berasal dari kalangan *Uleebalang*, yang memiliki kedekatan dengan Teuku Nyak Arif, dan menjadi

Residen pertama di Aceh setelah proklamasi kemerdekaan. Sedangkan laskar perjuangan berasal dari pemuda yang kebanyakan tergabung dalam PUSA, dan memiliki afiliasi langsung dengan para ulama. API dan laskar perjuangan mewakili dua kekuatan besar di Aceh (Zed, 2005; Fajar, 2015; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Sama halnya dengan kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Aceh pun berjalan dengan dinamika tersendiri. Keadaan yang diwariskan pasca pemerintah Jepang menduduki Aceh telah menimbulkan ketidakstabilan. Situasi ekonomi pada saat itu amat suram, serta penghidupan dan kehidupan begitu sulit. Penghidupan rakyat semata-mata tergantung dari pertanian, yang hasilnya tidak seimbang bila ditukarkan dengan uang Jepang yang sudah tidak mempunyai nilai. Pemberlakuan mata uang sebagai alat penukaran yang sah masih mengandalkan mata uang pemerintah Belanda dan mata uang pemerintah Jepang (KODAM I/IM, 1972:86; Shiraishi, 1988; dan Ismail, 1995).

Lahan-lahan produksi pertanian masyarakat tidak banyak dimanfaatkan. Pemerintah Daerah Aceh berusaha untuk meningkatkan hasil pertanian, terutama dengan cara memperluas areal persawahan. Tanah-tanah yang kosong diusahakan kembali dijadikan sawah dan ladang. Keadaan ini diperparah dengan adanya blokade yang dilakukan oleh pihak Belanda, yang menggantikan posisi Jepang setelah kalah dalam Perang Dunia II (1939-1945), dan berkeinginan kembali menguasai wilayah Indonesia (Kurasawa, 1993; Ismail, 1995:155; and Rustiani, Sjaifudian & Gunawan, 1997).

Alasan Belanda melakukan blokade adalah untuk mencegah masuknya senjata

dan peralatan militer ke Indonesia. Di balik blokade yang dilakukan Belanda tersimpan maksud yang dapat menjerumuskan Indonesia ke dalam lubang keterpurukan. Pemberlakuan blokade pula dimaksudkan agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan hebat, sehingga rakyat tidak merasa percaya kepada pemerintah Indonesia. Meskipun begitu, semangat perjuangan rakyat Aceh tetap bergelora untuk mendukung keberlangsungan Indonesia (Ricklefs, 2007; Reid, 2009; dan Fahlevi *et al.*, 2015:6).

Blokade yang dilakukan oleh Belanda mengindikasikan bahwa Belanda ingin kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia, termasuk di Aceh. Hal ini membuat geram pihak ulama di Aceh. Mereka tidak menginginkan kembali dampak sosial yang buruk terulang untuk kedua kalinya apabila Belanda kembali bercokol di Aceh. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Oktober 1945 di Kutaraja (Banda Aceh), Teungku Haji Hasan Krueng Kalee, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Haji Jakfar Siddiq Lambajat, dan Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri, dengan mengatasmakan seluruh ulama Aceh, mengeluarkan maklumat bersama bagi seluruh umat Islam di Aceh agar turut serta dalam perjuangan menolak kedatangan kembali Belanda. Beberapa bagian maklumat itu berbunyi, sebagai berikut:

Menurut keyakinan kami, perang ini adalah perjuangan suci yang disebut "Perang Sabil". Maka, percayalah wahai bangsaku, bahwa perjuangan ini adalah sebagai sumbangan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh almarhum Teungku Chik di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain. Dari sebab itu, bangunlah wahai bangsaku

sekalian, bersatu padu menyusun bahu, mengangkat langkah maju ke muka untuk mengikuti jejak perjuangan nenek-moyang kita dahulu. Tunduklah dengan patuh akan segala perintah-perintah pemimpin kita untuk keselamatan tanah air, agama, dan bangsa (dalam Tippe, 2000:31-32).

Dikeluarkannya maklumat ulama di atas tidak lain bertujuan untuk memperkuat tekad dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat revolusi semakin berkobar di kalangan rakyat Aceh. Mereka tidak ingin kembali merasakan hal yang sama, ketika Belanda menguasai wilayah Aceh sebelumnya. Otomatis, secara psikologis, semangat yang dimiliki rakyat Aceh semakin berapi-api sehingga mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk meneruskan perjuangan yang baru dimulai. Terlebih dengan mengorbankan jiwa dan raga yang dianggap sebagai mati syahid dalam ajaran Islam (Zamzami, 1990; Umar & Al-Chaidar, 2006; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Di samping itu, hubungan antara golongan *Uleebalang* (bangsawan) dan ulama terus mengalami gesekan menuju konflik yang tidak terelakkan. Benih-benih konflik yang telah lama ada, semakin tumbuh berkembang seiring berjalannya waktu. Tokoh *Uleebalang* yang menjadi biang terjadinya konflik adalah Teuku Muhammad Daud Cumbok. Ia adalah *Uleebalang* di daerah Sigli, yang benar-benar tidak menaruh rasa simpati ketika Indonesia berhasil memproklamasikan menjadi negara yang merdeka. Dengan demikian, ia memiliki pandangan yang begitu berbeda dengan mayoritas masyarakat Aceh, yang bersimpati dengan kemerdekaan Indonesia. Puncaknya, terjadi revolusi sosial yang dikenal dengan “Peristiwa Cumbok” di wilayah

Pidie. Peristiwa ini yang pada akhirnya mengusir kekuatan dan kekuasaan *Uleebalang* di Aceh, yang menginginkan kembali kehadiran Belanda di Aceh (Agustiningsih, 2007; Wiratmadinata, 2014; dan Heryati, 2015).

Perang itu pecah pada tanggal 4 Desember 1945 di Sigli, ibukota Kabupaten Aceh Pidie, antara kelompok ulama kontra kelompok *Uleebalang*. Di dalam peristiwa itu, salah satu peranan yang dilakukan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah bahwa ia bersikeras di dalam sidang Komite Nasional Daerah bahwa Komite harus mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi keadaan yang gawat di Kabupaten Pidie (Razali, 1989:14; Sjamsuddin, 1999:166; Agustiningsih, 2007; Heryati, 2015; dan Illham, 2016).

Memang, pada kenyataannya, bentrokan ini tidaklah sekecil yang diperkirakan oleh pemerintah Daerah. Maka, atas usulan dari Teungku Muhammad Daud Beureueh, pihak pemerintah Daerah mulai mengubah pandangan perihal konflik yang terjadi. Usulan yang diajukan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh terbukti mampu memberikan stimulus kepada pemerintah Daerah agar cepat dalam bertindak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (Umar & Al-Chaidar, 2006; Illham, 2016; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Tidak sampai di situ, Teungku Muhammad Daud Beureueh juga menginstruksikan kepada para pemimpin PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) di daerah Aceh Utara untuk memobilisasi para anggota PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia) dan *Mujahidin* guna menyerang bagian Timur Pidie. Sebagai

salah satu pemimpin PUSA, Teungku Muhammad Daud Beureueh memiliki sokongan kekuatan dari berbagai macam elemen masyarakat. *Mujahidin*, yang tidak lain adalah kelompok muda PUSA, memiliki kelengkapan persenjataan yang cukup mumpuni dan dapat dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai perang saudara ini. Pertempuran secara besar-besaran tetap berlangsung dengan memakan korban yang tidak terhingga banyaknya, baik korban manusia maupun korban harta benda (Morris, 1990:101; Amin, 2014:14; dan Sudirman, 2014).

Pada akhirnya, pihak yang menjadi pemenang berasal dari pihak ulama. Meskipun demikian, masalah kerugian tetap saja ditanggung oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Peristiwa Cumbok ini dapat memberi gambaran bahwa ancaman yang datang dari dalam wilayah Indonesia pun masih dapat muncul, sekalipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 (Razali, 1989; Umar & Al-Chaidar, 2006; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Selepas peristiwa Cumbok, muncul gerakan TPR (Tentara Perjuangan Rakyat), yang dipimpin Ketua Pemuda PUSA, yakni Amir Husin al-Mujahid. Ia mengumpulkan kekuatan secara tersembunyi dari wilayah Idi, melalui Pantai Timur Aceh, hingga sampai ke pusat pemerintahan di Kutaraja. Ia menginginkan agar sisa-sisa *Uleebalang* yang masih berkuasa agar dibabat habis dalam jabatannya. Gerakan yang dipimpin oleh Amir Husin al-Mujahid adalah gerakan liar, yang pada saat itu tidak dapat dihalangi oleh pemerintah Daerah, karena kelemahan alat-alat negara (Amin,

2014:26). Dikatakan sebagai “gerakan liar”, karena TPR berhasil menghimpun kekuatan yang cukup besar dengan mempersenjatai pengikutnya, baik berupa senjata tajam maupun senjata api. Saat itu belum terdapat kesatuan tentara yang dibentuk secara padu oleh pemerintah, sehingga keterbatasan kekuatan pemerintah belum mampu menangkis gerakan TPR di Aceh. Ditambah dengan situasi yang masih hangat pasca Peristiwa Cumbok, sehingga semangat dari pihak Amir Husin al-Mujahid semakin berapi-api untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Gerakan tersebut sebenarnya menyasar kepada ambisi pribadi Amir Husin al-Mujahid, yang ingin menduduki jabatan militer tertinggi di Aceh (Kurniawati, 2008; Heryati, 2015; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Teungku Muhammad Daud Beureueh, yang merupakan Ketua PUSA, tidak menyadari betul tingkah-laku yang dilakukan oleh Ketua Pemuda PUSA itu. Namun, pada akhirnya, gerakan TPR segera ditarik dari pedalaman Aceh, karena tindakan mereka sudah dianggap menyimpang dari perjuangan. Meskipun demikian, pada akhirnya golongan ulama dapat memanfaatkan keuntungan yang dihasilkan dari gerakan tersebut (Zamzami, 1990:46; Illham, 2016; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Menyusul Agresi Militer Belanda I terhadap Republik, pada bulan Juli 1947, Pemerintah Pusat mengangkat Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer Aceh. Teungku Muhammad Daud Beureueh diangkat menjadi Gubernur Militer untuk wilayah Keresidenan Aceh dan dua buah kabupaten, yakni Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo. Pengangkatan

Teungku Muhammad Daud Beureueh dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohamad Hatta, ketika ia mengunjungi wilayah Aceh (Morris, 1990:106; Umar & Al-Chaidar, 2006; dan Ricklefs, 2007).

Selama menjabat sebagai Gubernur Militer, Teungku Muhammad Daud Beureueh memiliki peranan yang cukup sentral. Beberapa hal yang dilakukan olehnya, antara lain, melakukan reorganisasi yang mencakup rekonstruksi dan rasionalisasi tentara atau angkatan perang. Selain itu, ia pun memiliki peran dalam proses pengumpulan dana untuk pembelian pesawat terbang, serta mengatasi gerakan yang dipimpin oleh Sayid Ali al-Sagaf (Umar & Al-Chaidar, 2006; Illham, 2016; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Teungku Muhammad Daud Beureueh sama sekali tidak mengambil sesuatu langkah ke arah pembentukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Aceh sampai dengan bulan Desember 1947. Berhubung seluruh perhatian sedang diarahkan untuk menghadapi Agresi Militer Belanda I, maka realisasi penggabungan semua laskar bersenjata ke dalam TNI di daerah Aceh belum dapat diselenggarakan pada waktunya. Meskipun demikian, kemauan Teungku Muhammad Daud Beureueh untuk mempersatukan laskar ke dalam satu tubuh yang bernama TNI tetap terlaksana pada akhirnya (KODAM I/IM, 1972:119; Sjamsuddin, 1999:220; dan Illham, 2016).

Ketika proses pembentukan TNI, Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak hanya melakukan reorganisasi tentara negara saja, ia sekaligus melakukan rasionalisasi tentara yang mengacu kepada komposisi pasukan, sesuai

dengan yang diinginkan oleh Mohamad Hatta, selaku PM (Perdana Menteri), perihal rasionalisasi pada masa revolusi Indonesia. Keadaan ini didukung oleh pemimpin-pemimpin laskar yang juga menuntut supaya TRI (Tentara Republik Indonesia) mengalami seleksi untuk dijadikan TNI. Dengan demikian, hasil seleksi terhadap laskar dan terhadap TRI diharapkan menjadi teras penyusunan TNI. Namun, dalam pelaksanaannya, langkah ini menuai banyak ketidaksukaan dari berbagai kalangan setelah dilakukan peleburan laskar perjuangan ke dalam TNI. Ternyata, banyak pihak yang tidak bisa masuk ke dalam tubuh TNI. Tetapi, dalam perkembangannya, mereka yang tidak tergabung dalam tubuh TNI pada akhirnya merelakan ketidakikutsertaannya (Kempen RI, 1953:164; Raliby, 1953; dan Illham, 2016).

Setelah Teungku Muhammad Daud Beureueh memberikan penjelasan tentang tahap dan situasi perjuangan masa itu, seluruh pejuang dengan ikhlas dan taat menerima dan mengikuti perintahnya. Dan sejak itu pula, puluhan ribu para pejuang Aceh dari berbagai kesatuan dengan ikhlas kembali ke masyarakat, tanpa menuntut imbalan apapun, termasuk tidak menuntut Surat Keterangan Pejuang (Jakobi, 1992:190; Agustiningsih, 2007; dan Illham, 2016).

Teungku Muhammad Daud Beureueh mampu melakukan reorganisasi TNI di Aceh dalam situasi politik yang belum stabil dan persatuan nasional yang masih rapuh. Pada akhirnya, pendeklarasian pembentukan TNI di Aceh terjadi pada 1 Juni 1948; dan secara resmi terbentuk TNI di Aceh pada 13 Juni 1948 dengan nama Divisi X. Keberhasilan ini dapat dijadikan sebagai acuan bahwa Teungku

Muhammad Daud Beureueh benar-benar seorang Republikan, sehingga dapat mengangkat citranya, baik di kalangan sipil maupun militer, yang akan berimbas semakin besarnya pengaruh dirinya di Aceh (Djumala, 2013:23; Illham, 2016; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Kesediaan laskar perjuangan untuk dibubarkan kesatuannya dan bergabung dalam TNI merupakan suatu prestasi yang gemilang dari kepemimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer. Namun, akan begitu mengecewakan apabila Teungku Muhammad Daud Beureueh gagal dalam melaksanakan tugasnya, mengingat Aceh dalam kondisi politik lebih stabil dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Kegemilangannya itu tidak lepas pula dari posisi dirinya sebagai Ketua PUSA. Pengalamannya dalam memimpin suatu organisasi berimbas pada kemampuan yang dimilikinya. Selain dengan adanya dukungan dari kalangan ulama yang merupakan kekuatan di sekelilingnya (Jakobi, 1992:190; Al-Chaidar, 1999; dan Illham, 2016). Dalam konteks ini pula, Muhammad Nur El Ibrahimy (2001) menyatakan sebagai berikut:

[...] akhirnya, dengan pengaruh Tgk. Muhd. Daud Beureueh, sebagai Gubernur Militer, dan pengorbanan-pengorbanan barisan rakyat pejuang itu, semuanya bersedia dibubarkan dan senjata-senjatanya diserahkan kepada TNI. Sedangkan anggota divisi-divisi sebagian kecil saja yang masuk ke TNI. Sebagian besar, dengan sukarela kembali ke masyarakat dengan tidak meminta penampungan dan sumbangan atau fasilitas apa-apa (Ibrahimy, 2001:52).

Bagi pemerintah Pusat, keberhasilan pembentukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Aceh bagi Indonesia cukup membawa angin segar. Hal ini

akan meningkatkan wibawa Republik di daerah-daerah lain dan di mata Belanda serta dunia internasional, sebab kegagalan pembentukannya dapat dipandang sebagai ketidakberdayaan pemerintah Pusat. Apabila yang terjadi adalah kegagalan, maka akan semakin mengindikasikan bahwa pemerintah Pusat tidak berdaya dalam membentuk salah satu alat kelengkapan negara yang memegang peranan penting. Terlebih bahwa daerah Aceh merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang tidak diduduki kembali oleh Belanda, sehingga kemungkinan terbaik bisa terjadi (Sjamsuddin, 1999:246; Zed, 2005; dan Ma'arif, 2014).

Tidak lama setelah Teungku Muhammad Daud Beureueh membentuk TNI, Soekarno mengunjungi Aceh pada 16 Juni 1948. Soekarno menyatakan bahwa keadaan Indonesia yang semakin genting dan keperluan akan pesawat terbang untuk hubungan antar pulau dan konsolidasi kekuatan di pelosok Indonesia amat diperlukan. Maka dari itu, Soekarno dengan sangat meminta kepada masyarakat Aceh untuk memberikan dukungannya bagi keberlangsungan Republik Indonesia. Melihat keadaan itu, Teungku Muhammad Daud Beureueh pun melakukan inisiatif untuk mengumpulkan dana yang berasal dari kalangan masyarakat Aceh. Para pengusaha Aceh yang tergabung dalam GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh) turut memberikan bantuan demi memenuhi keperluan pembelian pesawat terbang. Betapa besar kharisma yang dimiliki oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, sehingga masyarakat Aceh dapat diluluhkan hatinya dalam pengumpulan dana untuk pembelian pesawat terbang bagi keperluan pemerintah Republik

Indonesia (Ibrahimi, 2001; Jo, 2017; dan Mardira, 2017).

Keberhasilan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai inisiator dalam proses pengumpulan dana menjadi angin segar bagi pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Soekarno. Setelah dana terkumpul, Soekarno pun melakukan pidato di hadapan masyarakat Aceh, yang juga disaksikan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Kelak, pesawat terbang yang dibeli dari hasil penggalangan dana masyarakat Aceh ini menjadi cikal-bakal berdirinya maskapai penerbangan *Indonesian Airways*, atau yang kemudian dikenal dengan GIA (*Garuda Indonesia Airways*). Jabatan Gubernur Militer yang dipegang oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh bukan sembarang isapan jempol belaka, melainkan mampu dijalankan dengan baik oleh yang bersangkutan (Umar & Al-Chaidar, 2006; Jo, 2017; dan Mardira, 2017).

Di dalam melaksanakan tugas sebagai Gubernur Militer, Teungku Muhammad Daud Beureueh dihadapkan kepada permasalahan dengan munculnya gerakan Sayid Ali al-Sagaf. Gerakan ini menjalankan aksinya dengan mengeluarkan berbagai macam tuduhan negatif, yang ditujukan kepada petinggi pemerintahan dan dirumuskan dalam *Programma van Actie*, sebagai berikut:

Bahwa mereka yang telah dapat berhasil menduduki kursi-kursi pemerintahan telah mengadakan suatu perkumpulan "Banteng Hitam".

Bahwa mereka ini, terhadap setiap orang yang tidak termasuk perkumpulan ini, mengadakan satu front sehingga pemerintahan seluruhnya tetap dalam genggamannya mereka dan segala kesalahan-kesalahan mereka tetap terpendam.

Bahwa mereka melakukan berbagai-bagai kecurangan dan kejahatan antara lain: (1) Korupsi secara besar-besaran; (2) Melakukan perniagaan ilegal secara besar-besaran; (3)

Melakukan pembunuhan atas mereka yang tidak disukai dan dianggap berbahaya bagi mereka; (4) Tidak mengurus baitul mal dan zakat sebagaimana mestinya; (5) Tidak mengindahkan peraturan-peraturan dan instruksi dari pemerintah pusat; serta (6) Mempergunakan hasil-hasil tambang minyak dan perkebunan untuk kepentingan diri sendiri (dalam Amin, 2014:34).

Pejabat-pejabat yang dimaksud memiliki posisi penting dalam pemerintahan, sehingga kelompok yang tergabung dalam gerakan Sayid Ali al-Sagaf dapat dengan mudah memberikan semacam tuduhan bahwa mereka melakukan tindakan korupsi yang dapat merugikan banyak pihak. Namun, gerakan ini pada akhirnya mampu dihentikan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan cara mengeluarkan maklumat Gubernur Militer; dan ditangkaplah Sayid Ali al-Sagaf sebagai pemimpin gerakan tersebut (Ibrahimi, 2001; Umar & Al-Chaidar, 2006; dan Satriya, Suwarta & Santosa, 2018).

Posisi Indonesia terus mengalami situasi genting, terlebih ketika terbentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) pada akhir tahun 1948 hingga berlangsungnya KMB (Konferensi Meja Bundar) pada akhir tahun 1949. Hasil dari KMB, salah satunya, adalah pengakuan kedaulatan bagi Indonesia; tapi bukan berarti secara otomatis Indonesia terlepas dari berbagai permasalahan yang menerpa. Salah satu polemik yang muncul pasca pengakuan kedaulatan, antara lain, mengenai perubahan status yang disandang oleh Provinsi Aceh (Zed, 1997; Ricklefs, 2007; dan Satriya, Suwarta & Santosa, 2018).

Perubahan status wilayah Aceh, khususnya pada masa revolusi Indonesia, telah mengalami beberapa kali perubahan.

Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah Aceh dibentuk sebagai suatu Keresidenan dari Provinsi Sumatera; dan keadaan ini berlangsung hingga April 1946. Terjadi perubahan pada 16 April 1946, di mana Sumatera hanya dijadikan satu buah Provinsi saja dan dibentuk tiga Sub-Provinsi, yang meliputi Sub-Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Jabatan Gubernur ditujukan kepada pemimpin Provinsi, sedangkan jabatan Gubernur Muda ditujukan kepada pemimpin Sub-Provinsi. Secara otomatis, wilayah Aceh tetap masuk ke dalam Sub-Provinsi Sumatera Utara (Djaenuri *et al.*, 2003; Haikal *et al.*, 2013; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Perubahan kembali terjadi setelah ditetapkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1948, yang berisi mengenai perubahan atas pembagian wilayah di Sumatera. Wilayah Sumatera dibagi ke dalam tiga wilayah, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan, sehingga ketiga wilayah yang sebelumnya berstatus sebagai Sub-Provinsi telah mengalami perubahan menjadi Provinsi tersendiri. Peraturan ini diberlakukan pada 15 April 1948; dan ketiga wilayah itu dipimpin oleh seorang Gubernur. Pada masa itu di seluruh Sumatera, termasuk Aceh, diberlakukan pemerintahan militer karena terjadi Agresi Militer Belanda II pada bulan Desember 1948, sehingga urusan keamanan diserahkan kepada Gubernur Militer mengingat terjadi keadaan yang cukup tegang (Ricklefs, 2007; Haikal *et al.*, 2013; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Ketika PDRI menjalankan pemerintahannya, maka dikeluarkan penetapan oleh Syafruddin Prawiranegara, selaku Pengemban Tugas Pengganti

Presiden dan sebagai Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia. Penetapan itu berupa Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No.8/Des./WKPM/49, yang menyatakan bahwa Aceh menjadi Provinsi yang berdiri sendiri. Atas desakan para pemimpin Aceh, Syafruddin Prawiranegara menggunakan kekuasaan luar biasanya untuk mengeluarkan keputusan pemerintah, yang menjadikan Aceh sebagai Provinsi tersendiri (Morris, 1990:111; Zed, 1997; dan Ricklefs, 2007).

Mengingat ketika itu PDRI pernah menjalankan pemerintahannya di Kutaraja, yang notabene merupakan pusat pemerintahan Pemerintah Daerah Aceh, sehingga memungkinkan kedekatan para pemimpin Aceh dengan Syafruddin Prawiranegara tidak dapat terelakkan. Di samping itu, Syafruddin Prawiranegara mengakui keunikan sejarah Aceh dan kepentingan serta kesetiiaannya kepada Republik selama revolusi Indonesia berlangsung (Zed, 1997; Ricklefs, 2007; dan Kahin, 2008:259).

Pada tanggal 1 Januari 1950, Aceh dijadikan sebagai Provinsi dan Teungku Muhammad Daud Beureueh diangkat menjadi Gubernur Aceh, sesudah ia diberhentikan sebagai Gubernur Militer. Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama. Sebab telah terjadi upaya konsolidasi antara NRI (Negara Republik Indonesia) dan RIS (Republik Indonesia Serikat), yang merupakan negara dengan bentuk federasi dan dibentuk berdasarkan KMB (Konferensi Meja Bundar), yang menghasilkan kesepakatan dengan membentuk NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka RIS pun dibubarkan pada 19 Mei 1950 (Ismuha, 1983:92; Ibrahimy, 2001; dan Satriya,

Suwirta & Santosa, 2018).

Pembentukan 10 Provinsi dalam NKRI ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1950, yang meliputi: (1) Provinsi Sumatera Utara; (2) Provinsi Sumatera Tengah; (3) Provinsi Sumatera Selatan; (4) Provinsi Kalimantan; (5) Provinsi Sulawesi; (6) Provinsi Jawa Barat; (7) Provinsi Jawa Tengah; (8) Provinsi Jawa Timur; (9) Provinsi Maluku; dan (1) Provinsi Sunda Kecil. Bentuk negara yang dipilih adalah “Negara Kesatuan”, meskipun tidak sedikit pihak yang tetap menginginkan bentuk “Negara Serikat” atau Federasi. Pemerintah Pusat menganggap bahwa Negara Kesatuan merupakan bentuk yang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan situasi politik yang belum stabil pasca pengakuan kedaulatan, sehingga Indonesia memerlukan pemersatu yang tergambar dalam bentuk negara yang dipilih (Ricklefs, 2007; Kaho, 2012; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).¹

Ketiadaan Provinsi Aceh dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1950 tersebut membuat permasalahan baru perihal perubahan status yang dimiliki oleh Aceh. Mayoritas para pemimpin di Aceh tetap menginginkan Aceh dijadikan sebagai suatu Provinsi tersendiri. Tidak terkecuali dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Gubernur Aceh pasca keputusan yang disahkan oleh Wakil Perdana Menteri, Sjafruddin Prawiranegara (Zed, 1997; Ricklefs, 2007; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

¹Lihat juga “Pembentukan Daerah Propinsi: Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1950, Tanggal 14 Agustus 1950”. Tersedia secara online di: http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_21_1950.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2018].

Untuk menangani sikap keras kepala para pemimpin Aceh tersebut, pemerintah Pusat mengirimkan suatu panitia penyelidikan mengenai pembentukan Provinsi Aceh, yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. Terhitung beberapa orang pejabat tinggi pemerintah Pusat, seperti Sjafruddin Prawiranegara, mantan Presiden PDRI; Menteri Negara, Mr. Assaat; Wakil Presiden, Mohamad Hatta; dan Perdana Menteri, Mohammad Natsir mengunjungi Aceh untuk mendorong agar menerima penggabungan tersebut (Surachman & Kutoyo, 1977:185; Zed, 1997; dan Kahin, 2008:260).

Penggabungan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara bisa dianggap pula sebagai suatu kemajuan, karena memungkinkan penghilangan pandangan bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang bersifat kedaerahan, yang hanya menerima satu golongan saja tanpa membaaur dengan masyarakat daerah lain. Hal ini akan memberikan manfaat, karena kesempatan bekerja sama dalam berbagai hal akan saling menguntungkan. Namun, para pemimpin Aceh, termasuk Teungku Muhammad Daud Beureueh, menilai bahwa Provinsi Aceh merupakan representasi identitas ke-Islam-an mereka (Djumala, 2013:29; Illham, 2016; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Tradisi masyarakat Aceh yang mengakar kuat sejak dahulu kala terbentuk atas peran penting ajaran Islam, sehingga dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Aceh selalu memiliki keterkaitan dengan unsur ke-Islam-an. Di samping itu, pembentukan Provinsi Aceh didasarkan atas kemauan rakyat. Aceh meminta mengurus sendiri dalam bentuk Provinsi guna lekas tercapai kebahagiaan rakyat, yang telah berarti memberikan

pertolongan besar kepada pemerintah Pusat (Kempen RI, 1953:408; Raliby, 1953; dan Amiruddin ed., 2008).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1950, pemerintah Pusat yang diwakili oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir, pada 23 Januari 1951, membubarkan Provinsi Aceh dan menggabungkannya dengan Provinsi Sumatera Utara (Djumala, 2013:28).² Tentu saja, keputusan tersebut membuat Teungku Muhammad Daud Beureueh bereaksi. Meski sebelumnya ia telah menaruh harapan kepada Mohammad Natsir agar mampu mempertimbangkan kembali keinginannya dan masyarakat Aceh, tetapi tetap saja pemerintah Pusat mengetuk palu bahwa Aceh digabungkan kedalam Provinsi Sumatera Utara (Ibrahimy, 2001; Illham, 2016; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Akibat dari perubahan status wilayah Aceh itu berdampak kepada munculnya benih-benih perlawanan yang dilakukan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Ia menilai bahwa pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Soekarno, tidak menepati janji. Hal ini seperti yang telah dibicarakan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh kepada Soekarno, ketika Presiden itu berkunjung ke Aceh pada pertengahan Juni 1948. Presiden Soekarno sempat memberikan tanggapannya kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh perihal keinginan untuk menjadikan Aceh sebagai wilayah yang menganut dan menerapkan syariat Islam (Ibrahimy, 2001; Reid, 2009; Illham, 2016; Jo, 2017; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

Kekecewaan Teungku Muhammad Daud Beureueh terhadap pemerintah

Pusat mencapai puncak ketika ia memutuskan untuk bergabung kedalam gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), yang sebelumnya telah diproklamasikan di Jawa Barat oleh S.M. (Sekarmadji Maridjan) Kartosoewirjo, pada tanggal 7 Agustus 1949. Teungku Muhammad Daud Beureueh benar-benar merasa kecewa atas keputusan yang dilakukan pemerintah Pusat, yang seakan-akan melupakan kontribusinya dan jasa-jasa dari masyarakat Aceh ketika membantu perjuangan bagi tegaknya Republik pada masa revolusi Indonesia, 1945-1950 (Ibrahimy, 2001; Fahri, 2005; Umar & Al-Chaidar, 2006; Illham, 2016; dan Satriya, Suwirta & Santosa, 2018).

KESIMPULAN ³

Ketika masa revolusi Indonesia berlangsung di Aceh, baik kondisi politik maupun kondisi sosial-ekonomi di Aceh menunjukkan ketidakstabilan. Kondisi politik berjalan penuh dinamika, karena adanya berbagai organisasi ketentaraan dan laskar perjuangan. Begitupun kondisi

³*Sebuah Pengakuan*: Artikel ini – sebelum diubah-suai dan dikemas-kini dalam bentuknya sekarang – pernah diterbitkan dalam *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol.7, No.1, 2018. Artikel ini juga merupakan ringkasan Skripsi Sarjana dari Penulis I (Bambang Satriya), yang dibimbing oleh Penulis II (Andi Suwirta) dan Penulis III (Ayi Budi Santosa); serta dipertahankan dalam Ujian Sidang Sarjana di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung, pada tanggal 29 Juni 2016. Penulis I mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Pimpinan Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI atas didikan dan bimbingannya dalam bidang akademik; juga kepada Redaksi Jurnal *FACTUM* atas izinnya untuk menerbitkan ulang artikel ini dalam jurnal *INSANCITA*. Penulis I juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Penulis II dan Penulis III, yang telah membimbing dan membantu dalam proses penulisan karya ilmiah berupa Skripsi Sarjana, termasuk dalam proses penulisan artikel ini. Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi dalam artikel ini tetap menjadi tanggung jawab akademik kami bertiga, sebagai penulis, dan tidak ada hubung-kaitnya dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak.

²Lihat kembali catatan kaki nomor 1, *Ibidem*.

sosial-ekonomi yang dapat dikatakan jauh dari memuaskan, karena pewarisan keadaan dari pemerintahan pendudukan Jepang yang membuat lahan pertanian menjadi kurang produktif dan nilai dari mata uang juga mengalami inflasi. Ditambah lagi dengan adanya blokade dari pihak Belanda. Namun para ulama Aceh tidak menyerah, termasuk Teungku Muhammad Daud Beureueh. Mereka justru mengeluarkan maklumat bersama untuk melawan penjajah Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia.

Ketika peristiwa Cumbok terjadi, Teungku Muhammad Daud Beureueh melakukan upaya dengan meyakinkan pemerintah Daerah untuk memperhatikan konflik yang sedang berlangsung. Selain itu, ia pun memerintahkan pengerahan pasukan *Mujahidin* untuk memberikan perlawanan kepada kaum *Uleebalang* (bangsawan) di Pidie, Aceh. Ia pun mampu menghentikan gerakan TPR (Tentara Perjuangan Rakyat) pimpinan Amir Husin al-Mujahid, yang ambisius.

Selama menjabat sebagai Gubernur Militer untuk Daerah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureueh mampu membentuk TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan cara meleburkan laskar perjuangan. Namun, dalam proses seleksi itu tidak seluruh anggota dari laskar perjuangan bisa masuk ke dalam tubuh TNI. Selain itu, Teungku Muhammad Daud Beureueh menjadi inisiator pengumpulan dana untuk pembelian pesawat terbang bagi pemerintah Indonesia. Ia pun mampu menghentikan gerakan Sayid Ali al-Sagaf, yang mempropagandakan kebusukan pejabat pemerintah lokal di Aceh.

Akhirnya, sikap Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah menolak ketika

Aceh digabungkan kedalam Provinsi Sumatera Utara, sehingga hal ini berujung kepada kekecewaannya kepada pemerintah Pusat dan kepada Presiden Soekarno.⁴

Referensi

- Agustiningsih, Nur. (2007). "Konflik Ulama-Uleebalang 1903-1946 dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Sosial di Aceh". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS [Universitas Sebelas Maret].
- Al-Chaidar. (1999). "Teungku Muhammad Daud Beureueh: Bapak Darul Islam dan Bapak Orang-orang Aceh" dalam *Suara Hidayatullah*, Edisi Juni. Tersedia secara online juga di: <https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/gapai/Beureueh.html> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 5 Oktober 2018].
- Alian. (2017). "Metodologi Sejarah dan Implementasi dalam Penelitian". Tersedia secara online di: http://eprints.unsri.ac.id/3680/1/1.METODOLOGI_SEJARAH_DAN_IMPLEMENTASIN_DALAM_PENELITIAN.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 5 Oktober 2018].
- Amin, S.M. (2014). *Memahami Sejarah Konflik Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Amiruddin, M. Hasbi [ed]. (2008). *Aceh Serambi Mekkah*. Banda Aceh: Penerbit Pemprow [Pemerintah Provinsi] Aceh.
- Anderson, Benedict R.O.G. (1988). *Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946*. Jakarta: Sinar Harapan, Terjemahan.
- Benda, Harry J. (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945*. Jakarta: PT Pustaka Jaya, Terjemahan.
- Daud, Anwar. (2006). *Peristiwa Cumbok di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Aceh.
- Denzin, Norman K. (2008). "Evolution of Qualitative Research" in Lisa M. Given [ed]. *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, Volumes 1 & 2. Los Angeles, London, New Delhi, and Singapore: A SAGE Reference Publication.
- Dewanto, N. [ed]. (2011). *Daud Beureueh: Pejuang*

⁴**Pernyataan:** Kami, dengan ini, menyatakan bahwa artikel ini adalah karya kami bertiga; dan ianya bukan hasil plagiat, karena sumber-sumber rujukan yang kami gunakan secara jelas dinyatakan dan dicantumkan dalam Referensi. Kami juga bersedia untuk menerima sanksi akademik, sekiranya di kemudian hari ada pihak-pihak yang meragukan dan mengklaim bahwa artikel ini tidak sesuai dengan pernyataan kami bertiga.

- Kemerdekaan yang Berontak*. Jakarta: KPG [Kepustakaan Populer Gramedia] dan Tempo.
- Djaenuri, Aries *et al.* (2003). *Hubungan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Penerbit UT [Universitas Terbuka], cetakan ke-4.
- Djumala, D. (2013). *Soft Power untuk Aceh*. Jakarta: Gramedia.
- Drooglever, P.J. (1999). *Guide to the Archives on Relations between the Netherlands and Indonesia, 1945-1963*. The Hague: ING Research Guide.
- Fahlevi, W. *et al.* (2015). "Tinjauan Historis Pengaruh Inflasi Indonesia terhadap Ketahanan Nasional Tahun 1945-1950" dalam *PESAGI: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, Volume 4(2), hlm.1-12.
- Fahri, Ahmad. (2005). "Darul Islam Aceh, 1953-1962: Telaah terhadap Akar Masalah Pemberontakan". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Tersedia secara online juga di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7394/1/AHMAD%20FAHRI-FAH.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 1 Oktober 2018].
- Fajar, Achmad Chusnul. (2015). "Peran Teuku Nyak Arif dalam Perjuangan Kemerdekaan di Tahun 1919-1946". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Surabaya: UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Ampel.
- Gade, Syabuddin & Abdul Ghafar Don. (2018). "Peranan Ulamak dalam Pembinaan Negara-Bangsa: Pengalaman Dakwah Ali Hasjmi". Tersedia secara online di: <https://www.researchgate.net/publication/322592358> *Peranan Ulamak dalam Pembinaan Negara Bangsa Pengalaman Dakwah Ali Hasjmy* [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 15 Januari 2019].
- Gottschalk, L. (1983). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI [Universitas Indonesia] Press, Terjemahan.
- Haikal, Husain *et al.* (2013). "Revolusi Kemerdekaan di Sumatera Abad XX". *Hasil Penelitian Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: FIS UNY [Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta]. Tersedia secara online juga di: <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132306803/penelitian/revolusi-kemerdekaan-di-sumatera-pada-abad-ke-20.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 28 Oktober 2018].
- Heryati. (2015). "Ulama dan Ulee Balang: Potret Revolusi Sosial di Aceh Tahun 1945-1946" dalam *Jurnal HISTORIA*, Vol.3, No.2, hlm.83-90. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/90285-ID-ulama-dan-ulee-balang-potret-revolusi-so.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 1 Oktober 2018].
- Ibrahimy, Muhammad Nur El. (2001). *Peranan Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Pergolakan di Aceh*. Jakarta: Media Dakwah.
- Illham, Muhammad. (2016). "Peran Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Pemberontakan di Aceh, 1953-1962". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Tersedia secara online juga di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32193/1/MUHAMMAD%20ILLHAM.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 1 Oktober 2018].
- Iqbal, Muhammad & Muhammad Rizal. (2012). "Peran Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Bidang Pendidikan Islam di Aceh" dalam *Jurnal Lentera*, Vol.12, No.1 [Maret]. Tersedia secara online juga di: <http://jurnal.umuslim.ac.id/index.php/LTR1/article/view/392/263> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 1 Oktober 2018].
- Iskandar, M. (2000). *Peranan Elit Agama pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Depdiknas RI [Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia].
- Ismail, M.G. (1995). "Ekonomi pada Masa Revolusi Kemerdekaan di Aceh, 1945-1949" dalam Z. Ghazali [ed]. *Sejarah Lokal: Kumpulan Makalah Diskusi*. Jakarta: Proyek IDSN DepdikbudRI [Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia], hlm.151-167.
- Ismuha. (1983). "Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah" dalam T. Abdullah [ed]. *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.1-109.
- Jakobi, T.A.K. (1992). *Aceh Daerah Modal: Long March ke Medan Area*. Jakarta: Yayasan Seulawah RI-001.
- Jo, Hendi. (2017). "Air Mata Bung Karno Meleleh di Aceh" dalam *HISTORIA: Masa Lalu Selalu Aktual*. Tersedia secara online juga di: <https://historia.id/politik/articles/air-mata-bung-karno-meleleh-di-aceh> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Oktober 2018].
- Kahin, George McTurnan. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*. Surakarta: Pustaka Sinar Harapan dan UNS [Universitas Negeri 11 Maret] Press, terjemahan Nin Bakdi Soemanto.
- Kahin, Audrey. (2008). *Dari Pemberontakan ke Integrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kaho, Josef Riwu. (2012). *Analisis Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit FISIPOL UGM [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada].
- Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Kempen RI [Kementerian Penerangan Republik Indonesia]. (1953). *Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara*. Djakarta: Kementerian Penerangan RI.
- KODAM I/IM [Komando Daerah Militer I/Iskandar Muda]. (1972). *Dua Windu Kodam Iskandar Muda*. Banda Aceh: Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurasawa, Aiko. (1993). *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa, 1942-1945*. Jakarta: PT Grafindo, Terjemahan.
- Kurniawati. (2008). "Perang Cumbok dan Gerakan Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) di Aceh (Desember 1945 Maret 1946)" dalam *LONTAR: Jurnal Sejarah*, Vol.5, No.2. Tersedia secara online juga di: <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/lontar/article/view/2397> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Oktober 2018].
- Kurniawati. (2015). "Mencari Makna Dalam Sejarah: Meninjau Kembali Historiografi Indonesia-Sentris sebagai Sumber Belajar Sejarah" dalam *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol.4, No.2 [Juli], hlm.13-20.
- Lapian, A.B. et al. (1996). *Terminologi Sejarah: 1945-1950 dan 1950-1965*. Jakarta: Proyek IDSN Depdikbud RI [Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia].
- Ma'arif, Syamsul. (2014). "Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi" dalam *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, Volume 19(2), Juli, hlm.257-286.
- Mardira, Salman. (2017). "Seulawah RI: Dari Aceh untuk Republik" dalam *Banda Aceh Tourism*. Tersedia secara online juga di: <https://www.bandaacehtourism.com/destinasi/sejarah/seulawah-ri-dari-aceh-untuk-republik> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Oktober 2018].
- Morris, E. (1990). "Aceh: Revolusi Sosial dan Pandangan Islam" dalam Audrey Kahin [ed]. *Pergolakan Daerah di Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Graffiti Pers, Terjemahan, hlm.89-116.
- Muhammaddar. (2014). "Kedudukan Ulama dan Uleebalang sebagai Elit Sosial Politik Aceh (1900-1946)". *Tesis Magister Tidak Diterbitkan*. Medan: Program Pascasarjana IAIN [Institut Agama Islam Negeri] Sumatera Utara. Tersedia secara online juga di: <http://repository.uinsu.ac.id/1672/1/Muhamaddar.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2018].
- Nasution, A.H. (1977). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid I*. Bandung: Penerbit Disjarah AD [Dinas Sejarah Angkatan Darat] dan PT Angkasa.
- Okotorino, Nino. (2017). *Konflik Bersejarah: Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Digital.
- "Pembentukan Daerah Propinsi: Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1950, Tanggal 14 Agustus 1950". Tersedia secara online di: http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_21_1950.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2018].
- Piekaar, A.J. (1949). *Atjeh en de Oorlog met Japan*. 's-Gravenhage and Bandung: NV Uitgeverij W van Hoeve.
- Raditya, Iswara N. (2017). "Teuku Muhammad Hasan: Gubernur Sumatra Pertama dan Satu-satunya". Tersedia secara online di: <https://tirto.id/teuku-muhammad-hasan-gubernur-sumatra-pertama-dan-satu-satunya-cmbr> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2018].
- Raliby, Osman. (1953). *Documenta Historica: Sedjarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Perjuangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bulain-Bintang.
- Razali, Ratna. (1989). *Perang Cumbok di Aceh Tahun 1945*. Jakarta: Depdikbud RI [Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia].
- Reid, Anthony. (1974). *The Indonesian National Revolution, 1945-1950*. Melbourne: Longman Pty, Ltd.
- Reid, Anthony. (2009). "Indonesia, Aceh, and the Modern Nation-State" in Minako Sakai, Glenn Banks & J.H. Walker [eds]. *The Politics of the Periphery in Indonesia*. Singapore: NUS [National University of Singapore] Press, pp. 84-100.
- Ricklefs, M.C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, Terjemahan.
- Roring, Irma Widyani. (2000). *Teuku Moehammad Hasan: Perjalanan yang Memberi Mahkota*. Jakarta: Puri Ratnawangsa Media.
- Rustiani, Frida, Hetifah Sjaifudian & Rimbo Gunawan. (1997). *Mengenal Usaha Pertanian Kontrak (Contract Farming)*. Bandung: Yayasan AKATIGA. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/477-ID-mengenal-usaha-pertanian-kontrak-contract-farming.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2018].
- Saleh, H. (1992). *Mengapa Aceh Bergejolak*. Jakarta: Graffiti Pers.
- Satriya, Bambang, Andi Suwarta & Ayi Budi Santosa. (2018). "Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Revolusi di Aceh (1945-1950)" dalam *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol.7, No.1, hlm.27-42.
- Shiraishi, S. (1988). "Pemerintah Militer Jepang di Aceh, 1942-1945" dalam A. Nagazumi [ed]. *Pemberontakan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia], hlm.38-82.
- Siregar, Rusman. (2018). "S.M. Amin: Gubernur yang Pernah Menjabat di Dua Provinsi" dalam *Sindo News.Com*, pada 29 April. Tersedia secara online juga di: <https://daerah.sindonews.com/>

- [read/1301477/29/sm-amin-gubernur-yang-pernah-menjabat-di-dua-provinsi-1524872527](#) [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 1 Januari 2019].
- Sjamsuddin, Nazaruddin. (1999). *Revolusi di Serambi Mekah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh, 1945-1949*. Jakarta: UI [Universitas Indonesia] Press.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sudirman. (2014). "Pesindo Aceh, 1945-1952: Organisasi Nasional di Tingkat Lokal" dalam *Patanjala*, Vol.6, No.1 [Maret], hlm.49-64.
- Sufi, M. Rusdi et al. (1997). *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.
- Sufi, Rusdi, Muhammad Nasir & Zulfan. (1997). *Peranan Tokoh Agama dalam Perjuangan Kemerdekaan, 1945-1950, di Aceh*. Jakarta: Proyek IDSN Ditjenbud Depdikbud RI [Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia].
- Surachman & S. Kutoyo [eds]. (1977). *Sejarah Daerah: Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Proyek Penelitian Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Suwirta, Andi. (1989). "Ketika Saudara Tua Disambut oleh Saudara Muda: Sikap Politik Pemerintah Penduduka Jepang terhadap Umat Islam Indonesia, 1942-1945". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan] Bandung.
- Tippe, S. (2000). *Aceh di Persimpangan Jalan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Umar, Mawardi & Al-Chaidar. (2006). *Darul Islam Aceh: Pemberontak atau Pahlawan?* Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pemprov NAD [Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam]. Tersedia secara online juga di: https://www.academia.edu/3557550/Darul_Islam_Aceh_Pemberontak_atau_Pahlawan [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 5 Oktober 2018].
- Veer, Paul van T. (1987). *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*. Jakarta: Grafiti Pers, Terjemahan.
- Vickers, Adrian. (2005). *A History of Modern Indonesia*. New York: Cambridge University Press.
- Wahidy, H. (1960). "Mengenang Kembali Semangat dan Tekad 17 Agustus '45 dalam Seksi Penerangan/ Dokumentasi Komite Musjawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh" dalam *Modal Revolusi 45*, hlm.72-80.
- Wiratmadinata. (2014). "Akar Konflik Internal Aceh: Dari Perang Cumbok sampai Konflik antara PA dan PNA" dalam *The Aceh Institute*, pada 2 April. Tersedia secara online juga di: <https://acehinstitute.org/pojok-publik/politik/dari-perang-cumbok-sampai-konflik-antara-pa-dan-pna.html> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 5 Oktober 2018].
- Zamzami, A. (1990). *Jihad Akbar di Medan Area*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Zed, Mestika. (1997). *Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia, sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Zed, Mestika. (2005). *Giyugun: Cikal-Bakal Tentara Nasional di Sumatera*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
- Zentgraaf, H.C. (1983). *Aceh*. Jakarta: Penerbit Beuna, terjemahan oleh Aboe Bakar.